DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abidin, Andi Zainal. *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Bandung: Alumni, 1987.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Cetakan Kedua. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

_____. *Sengketa Kewenangan Lembaga Negara*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

Atmasasmita, Romli. *Peradilan Pidana Kontemporer*. Bandung: Prenada Media, 2019.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Cetakan Ke-27. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Djazuli, A. *Fiqh: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2006.

_____. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.

Fakultas Hukum Universitas Udayana. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Denpasar: Universitas Udayana, 2016.

Hamzah, Andi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembanganya*. Jakarta: Sofmedia, 2012.

_____. *Asas-asas Hukum Pidana*. Cetakan IV Edisi Revisi. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014.

_____. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

_____. *Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.

_____. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, 2017.

Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1997.

Lopa, Baharuddin. *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001.

_____. *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Alumni, 1987.

Mamudji, Sri. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Cetakan Kelima. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.

Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Cetakan Ke-7. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Mulyadi, Lilik. *Tindak Pidana Korupsi; Aspek Normatif, Teoritis, dan Praktik Hukum*. Bandung: Alumni, 2018.

Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam: Pengantar dan Asas-Asasnya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Sahetapy, J.E. *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Delik Korupsi: Tinjauan Kewenangan Audit dan Pembuktian*. Surabaya: Airlangga University Press, 2019.

Saidi, Muhammad Djafar. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Sasangka, Hari dan Lily Rosita. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2003.

Simorangkir, J.C.T. *Hukum dan Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung, 1983.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan Ke-9. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

Soekanto, Soeryono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984.

Sriwidodo, Joko. *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Kepel Press, 2019.

Tuanakotta, Theodorus M. *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Jakarta: Salemba Empat, 2010.

_____. *Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Salemba Empat, 2004.

Wiyono, R. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

JURNAL DAN KARYA ILMIAH LAIN

Anjari, Warih. "Kedudukan Asas Legalitas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 dan 025/PUU-XIV/2016". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16 No. 1. Jakarta, 2019.

Daut, Adhyaksa. "Penerapan Delik Formil Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48 No. 2, 2018.

Josua, Lambertus dan Ade Adhari. "Kepastian Hukum Penerapan Kriteria Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia". *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 4 No. 2. Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, 2021.

Mubarok, Arqi Nur dan Wahyu Priyanka Nata Permana. "Implementasi Putusan MK 31/PUU-X/2012 jo. SEMA 4 Tahun 2016 Dalam Putusan Pengadilan TIPIKOR". *Jurnal Konstitusi dan Peraturan Hukum*, Vol. 7 No. 1, 2024.

Pardede, Marulak. "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 Terhadap Kewenangan BPK Dalam Menghitung Kerugian Negara". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 18 No. 3, 2018.

Prastowo, Budi. "Delik Formil/Materiil, Sifat Melawan Hukum Formil/Materiil dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi: Kajian Teori Hukum Pidana terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006". *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol 24 No 3. Bandung, 2006.

Pratama, Henza Tri. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Mengimplementasikan Nilai Keadilan, dan Kepastian Hukum (Studi Kasus Pencemaran Nama Baik)". *Tesis*. Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, 2013.

Redi, Ahmad dan Ade Adhari. "Kepastian Hukum Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17 No. 4, 2020.

Riyadi, Eko. "Karakteristik Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi: Studi Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Berdimensi Hak Asasi Manusia". *Tesis*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2012.

Silalahi, Rio Rinaldi. "Penegakan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016". *Lex Renaissance*, No. 2 Vol. 3, 2018.

Simatupang, Dian Puji Nugraha. "The Authority of The Audit Board of The Republic of Indonesia in Determining State Losses". *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 19 No. 1, 2019.

Sjarif, Fitriani Ahlan. "Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dalam Penghitungan Kerugian Keuangan Negara: Studi Kasus BPK vs BPKP". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49 No. 1, 2019.

Sutrisno, Fenty Puluhulawa dan Lusiana Margareth. "Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Gorontalo Law Review*, No. 2 Vol. 3. Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, 2020.

Widiantara, I Nyoman dan I Ketut Rai Setiabudhi. "Kewenangan BPK dan BPKP Dalam Menghitung Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi". *Kertha Wicaksana*, Vol. 15 No. 1, 2021.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*), Staatsblad Tahun 1915 Nomor 732.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2024 Sebagaimana Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 013/PUU-I/2003.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 31/PUU-X/2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 25/PUU-XIV/2016.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2867 K/Pid.Sus/2021.

Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap.

Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 04/Pid.Sus/2013/PN.KPG.

Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 19/Pid.Sus/2013/PN.KPG.

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2014/PN.DPS.

Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mtr.

Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnd.

Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.

Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg.

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst.

INTERNET

Indonesia Corruption Watch. “Laporan Hasil Pemantauan Persidangan Perkara Korupsi 2024”. *https://antikorupsi.org/id/tren-penindakan-kasus-korupsi-2024*. Diakses terakhir pada 23 Oktober 2025.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. “Delik”. *https://kbbi.web.id/delik*. Diakses terakhir pada 24 November 2025.

Murdian, Ari Qurniawan. "Kewenangan Lembaga Audit dalam Penetapan Kerugian Negara Pasca SEMA No. 2/2024". *https://dandapala.com*. Diakses terakhir tanggal 13 November 2025.

NU Online. "Qur'an Surat Ali Imran Ayat 161". *https://quran.nu.or.id/ali-imran/161*. Diakses terakhir pada 23 Januari 2025.